

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**DRARMASRAYA DI ANTARA
KERAJAAN-ERAJAJAN MELAYU KUNO DI SUMATRA BARAT*)**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	20 Juni 2011
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	FI
NO. INVENTARIS :	205 (Hd/2011-d.14)
KLASIFIKASI :	959.01 Zed d.t

Mestika Zed

Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

***)Makalah disampaikan pada seminar Nasional tentang " Sejarah Kabupaten Dharmasraya" di
Gunung Medan, tanggal 8-9 Desember 2009**

DHARMASRAYA DI ANTARA KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU KUNO DI SUMATERA *)

Oleh Mestika Zed

Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)
FIS, Univ. Negeri Padang

MAKALAH akan memperbincangkan tentang kedudukan Dharmasraya di antara kerajaan-kerajaan Melayu Kuno yang pernah berkembang di Sumatera pada abad ke-7-14 M. Pada periode ini terdapat sejumlah kerajaan Hindu-Budha yang timbul-tenggelam atau mengalami pergeseran dalam perjalanan sejarahnya di beberapa kawasan kawasan Batanghari Jambi sekarang, Sriwijaya, Dharmasraya, Pagaruyung, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Siguntur, Jambu Lipo dan lain-lain di sekitar kawasan hulu aliran sungai (DAS) yang mengalir ke pantai timur. Argumen pokok yang ingin dikemukakan dalam makalah ini ialah bahwa eksistensi dan kedudukan sejarah Kerajaan Dharmasraya tidak dapat dipahami secara utuh tanpa terlebih dulu memahami sejarah Melayu Kuno Sumatera sebagai "unit historis" yang "legitimate" dalam memahami episode sejarah periode itu. Jika demikian maka pertanyaan pokok yang ingin diajukan makalah ini ialah apa yang dimaksud dengan Melayu Kuno dan bagaimana kedudukan kerajaan Dharmasraya di dalamnya? Bagaimana pula hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Melayu Kuno di masa lalu, baik secara horizontal (sinkronik), yakni sezaman dengannya maupun secara vertikal (diakronik) atau dalam lintasan waktu sebelum dan sesudahnya? Dengan rangkaian pertanyaan ini saya berharap kiranya makalah ini dapat memberikan sumbangan sekedarnya kepada forum seminar ini.

"Melayu Kuno Sumatera" sebagai Suatu Kategori Sejarah

Meminjam konsep "unit historis" Arnold Toynbee (1947:1-11) dalam kaitannya dengan sejarah Eropa dan J.C. Van Leur (1973) tentang sejarah Indonesia abad ke-18, kita mungkin dapat memahami sejarah "Melayu Kuno Sumatera" sebagai suatu kesatuan

*) Makalah dipersiapkan untuk seminra nasional tentang "Sejarah Kabupaten Dharmasraya" di Gunung Medan, tanggal 8-9 Desember 2009.

historis, dalam arti bahwa ia merupakan suatu bagian pengetahuan sejarah yang "legitimate" tentang Sumatera zaman kuno.¹ Atas dasar itu,² maka Melayu Kuno Sumatera bukan nama *suatu* kerajaan tertentu (tunggal), melainkan suatu "realm" (dunia atau "alam") Melayu – meminjam istilah Matheson (1975) dalam rangkaian episode di mana terdapat sejumlah kerajaan di dalamnya. Dan Kerajaan Dharmasraya merupakan salah satu bagian dari Alam Melayu Kuno Sumatera. Apabila kita dapat memahaminya sebagai suatu kesatuan sejarah, maka tugas kita yang pertama ialah mendefinisikan apa itu "Melayu Kuno" Sumatera sebagai suatu kategori atau "unit sejarah" tersendiri dan apa ciri-ciri utamanya; di mana letaknya? Sesudah itu baru mempelajari kedudukan kerajaan Dharmasraya di dalamnya.

Pertama-tama, yang disebut dengan Melayu Kuno Sumatera itu ialah mencakup keseluruhan komunitas dan budaya wangça (baca: wangsy) Melayu Kuno yang pernah hidup dan berkembang di Sumatera antara abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi. Selaku demikian, Alam Melayu Kuno Sumatera itu merupakan suatu kesatuan ranah (*domein*) dan ideologi dari nenek moyang *wangça* Melayu, yang hidup dan berkembang di Sumatera setelah melewati fase prasejarah atau zaman setelah mereka mengenal tulisan, yakni pengguna bahasa Melayu Kuno sebagai salah satu rumpun bahasa Austronesia (Belwood, 2000: 163ff) atau sebelum mereka memeluk agama Islam. Meskipun *wangça* Melayu Kuno tersebar di Nusantara, termasuk di Semenanjung Malaya dan Kalimantan seperti yang pernah diidentifikasi oleh Andaya (2001), kelompok mereka yang di Sumatera umumnya tersebar di daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir ke pantai timur, setidaknya mulai dari Sungai Barumun dan Rokan di utara seterusnya Sungai Siak, Kampar, Indragiri sampai ke Batanghari

¹ Konsep "unit historis" sebagaimana dimaksudkan oleh Toynbee ialah suatu bagian dari pengetahuan sejarah yang dapat dipahami atas dasar katagori dan bidang yang dapat diidentifikasi berupa suatu kompleks masalah-masalah, tema-tema serta topik-topik yang secara keseluruhan ditempatkan dalam suatu *setting* waktu dan tempat tertentu. Katagori di dalam penulisan sejarah tidak hanya berfungsi sebagai *analytical tool* untuk mengidentifikasi keadaan suatu masyarakat dalam suatu *setting* waktu dan tempat tertentu, melainkan juga untuk menetapkan ciri-ciri umumnya, di samping keaneka-ragamannya. Dalam hal ini termasuk kompleks masalah-masalah, tema-tema serta topik-topik yang semuanya berkait kulindan dengan pasangan waktu (*set of times*) dan lokasi sejarahnya. Dengan begitu konsep unit historis dapat membantu kita dalam melacak aspek-aspek kontinuitas (urutan kronologis) dan diskontinuitas (perubahan), yang menyertainya, sehingga penulisan sejarah tidak lagi hanya sekedar membeberkan urutan fakta-fakta dan urutan-urutan waktunya, namun keseluruhatnya harus disusun dengan pola-pola atau kerangka yang mendasarinya sebagai suatu kesatuan.

² Toynbee khususnya menggunakan konsep "peradaban" (*civilization*) sebagai unit historis dalam membahas sejarah Eropa dan juga dunia pada umumnya. Dalam kesatuan peradaban terdapat sistem politik yang berbedabeda, seperti Sparta dan Athena dalam peradaban Yunani Kuno. Sedang Van Leur dalam konteks sejarah Indonesia mengeritik karya-karya penulis sejarah kolonial yang cenderung meletakkan sejarah Indonesia abad ke-18 sebagai kejayaan "sejarah Kompeni (VOC). Namun dilihat dari sudut peradaban dalam arti luas, termasuk sistem politik dan ekonominya, maka menurut Van Leur dampak VOC pada masa ini, kecuali mungkin di beberapa tempat, tidaklah mengubah struktur sejarah orang Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi (atau jaringan perdagangannya).

dan Musi di selatan. Semuanya kini terletak di empat atau lima propinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi dan Sumsel).

Berdasarkan pengertian di atas, maka pertanyaan di mana letak lokasi tunggal pusat Melayu Kuno itu [?] menjadi tidak relevan, apabila upaya mencari dan menetapkan pusat kerajaan Melayu Kuno hanya ditujukan kepada satu lokasi tunggal saja. Salah satu alasannya ialah karena alam Melayu Kuno, tersebar di hampir seluruh kawasan Pulau Sumatera. Lagi pula, sumber-sumber yang paling tua, baik asing maupun lokal, ternyata telah menyebut kata Melayu itu sendiri (*Meloyu* atau *Molo-yeo*, *Melayupura*, *bhumimelayu*), setidaknya sejak pertengahan abad ke-7 dan kata itu tetap muncul sampai abad ke 14 dan bahkan pada abad-abad sesudahnya, seperti yang tampak dari naskah lama *Sejarah Melayu*.³ Sumber-sumber Jawa malahan mengidentikkan Melayu dengan Sumatera (Atmodjo, 1992: 2).

Namun demikian perdebatan klasik tentang letak Melayu Kuno rupanya telah belangsung selama puluhan taun, setidaknya sejak dekade kedua abad ke-20 itu,⁴ seperti yang dilangsir oleh Westenenk (1923) dan Krom (1926).⁵ Debat semacam ini terakhir kali mengemuka dalam seminar internasional tentang "Melayu Kuno" di Jambi pada tanggal 7-8 Desember 1991.⁶ Banyak informasi dan temuan baru hasil

³ Menurut catatan Djohan Hanafiah, naskah *Sejarah Melayu* yang asli telah ditulis pada tahun 1536, tetapi ada pula peneliti menyatakan bahwa naskah tersebut ditulis tahun 1612. Versi yang lebih kemudian dari *Sejarah Melayu* lebih dikenal dengan *Tuhfat al-Nafis* telah disalin kembali sebanyak 29 naskah salinan dan diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, Perancis, Poland, Tamil dan Cina (Djohan Hanafiah, 1992). Salah seorang pakar terkemuka dalam kajian *Sejarah Melayu* ini ialah, Virginia Matheson. Lihat, misalnya, salah satu tulisannya berjudul "Concepts of State in the Tuhfat al-Navis" dalam Anthony Reid (ed), 1979: 12-21).

⁴ Sejak awal abad ke-20, sudah banyak para pakar (terutama Belanda dan Perancis) yang mencoba mencari dan menemukan letaknya Untuk menyebut beberapa di antara mereka seperti, Moens, Krom, Kern, Obdeyen, de Casparis, Coedes, Schnitger (Belanda) dan Coedes, Damais, Ferrand (Perancis) dan Nilakanta Sastri dan Majumdar (dari India), Yamin, Slamet Mulyana, Setyawati Suleiman, Bochari, Pitono, R. Soekmono, Sartono, Bambang Budi Utomo, Djohan Hanafiah, Fachruddin Saudagar (dari Indonesia) serta nama lainnya seperti Wolters, McKinnon dan Andaya dari Amerika Serikat (nama-nama klasik dirujuk dari Setyawati Suleiman, 1999:1-2).

⁵ Dalam karyanya berjudul *De Hindoe Javaansche Geschiedenis* (1926), bertanyalah Krom: "... *Waar heeft dit oude Malayu nu eigenlijk gebleven?*" (di mana sesungguhnya letak kerajaan Malayu itu?) Pertanyaan itu dijawabnya sebagai berikut: *Dat de plaats van Malayu op het oogenblik zoo vast staat als in dergelijke gevallen mogelijk is, hebben in hoofdzaak te danken aan de studie van Rouffaer, die, oude argumenten ophalend en er nieuwe zeer krachtige aan toevoegend, met groote waarschijnlijkheid heeft aangetoond, dat Malayu het oude Djambi is* (Krom: 1926: 109). Terjemahan bebasnya kira-kira berbunyi demikian: "bahwa sementara ini lokasinya sudah begitu jelas seperti halnya yang difikirkan dalam studi Rouffaer (BKI Mo.77, 1921: 11-19), baik dengan mempertimbangkan argumen lama, maupun dengan menambahkan argumen baru yang sangat kuat, sangat mungkin menunjukkan bahawa "Melayu itu adalah Jambi Kuno".

⁶ Ada belasan makalah yang dibahas dalam seminar dua hari itu, baik oleh pakar luar maupun dalam negeri, dengan reputasi internasional. Sebagai salah seorang peserta awam dalam seminar tersebut – dalam arti saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah kuno, terasuk dalam ilmu alat (epigrafi) – saya tentu juga berhak memberikan penilaian, bahwa seminar itu, meskipun kaya informasi dan temuan-temuan data baru, hemat saya tidak ada "kamajuan" yang signifikan dalam interpretasi sejarahnya. Terlebih karena adanya kesan dan aroma sentimen/ subyektivisme provinsial yang sangat menonjolkan dalam seminar itu. Di sana tampak

penelitian mutakhir dari para pakar, yang dipresentasikan dalam seminar tersebut. Presentasi makalah, berikut debat-debat dalam seminar itu jelas memberi sumbangan berharga terhadap pengayaan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Sejarah Melayu Kuno. Masing-masing mengajukan data yang luas dengan interpretasinya sendiri-sendiri; yang satu menguatkan yang lain atau sebaliknya menolak dan membantah pendapat lain. Namun pada dasarnya, dalam seminar itu hanya terbuka dua pilihan: Jambi dan/ atau Sriwijaya di Palembang dan selebihnya dianggap sebagai "pinggiran". Antara kedua kubu mencari pembenaran dengan tafsiran sendiri-sendiri atas dasar bukti-bukti historis yang luas (linguistik, arkeologis dan tradisi). Ironisnya, tidak ada yang mencoba mengarahkan perhatian, bahwa pusat gravitasi itu sekali waktu pernah di Dharmasraya, misalnya, atau di Pagaruyung, di Muara Takus atau di Padanglawas, hulu Sungai Barumun atau di tempat lain. Atau berlangsung bersamaan di beberapa tempat berbeda. Walhasil, kalau ditelusuri genealogis pendapat-pendapat yang pernah berkembang sebelumnya, konklusi seminar di Jambi 1992 tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi debat lama, dan dengan demikian tidak mengalami kemajuan yang berarti, jika bukannya merosot dilihat dari sudut interpretasi yang dikemukakan. Pokoknya salah satu: Jambi atau Palembang.

Apabila kita kemudian dapat memahami Melayu Kuno sebagai suatu konsep "unit historis" yang dapat dipahami dalam konteks sejarahnya, sebagaimana diusulkan makalah ini, maka Melayu Kuno bukan Jambi atau di hiliran Batang Hari yang berpusat di Muara Jambi dan bukan pula di Bukit Siguntang (Palembang), yang konon dianggap sebagai pusat kharisma Melayu, sebagaimana yang dipertahankan oleh para pentolan dan para pengikutnya. Melayu adalah Melayu. Melayu Kuno Sumatera adalah suatu konstruk empirikal dengan sejumlah ciri-cirinya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Salah satu ciri utamanya ialah bahwa sejarah "Melayu Kuno" Sumatera merupakan suatu kesatuan ranah (*domein*) dan ideologi dari nenek moyang *wangça* Melayu, yang hidup dan berkembang di Sumatera setelah melewati fase prasejarah atau zaman setelah mereka mengenal tulisan, yakni pengguna bahasa Melayu Kuno. Erat kaitannya dengan ini, ialah bahwa *wangça* Melayu Kuno Sumatera memiliki "mitos" ideologi tentang asal usul nenek moyang yang sama (keturunan Iskandar Zulkarnain). Meskipun demikian sistem politik mereka tersebar secara sentrifugal dan bukan sebaliknya terpusat membentuk imperium model negara-negara despotisme *a la* Cina atau Mojopahit di Jawa. Konsep "negara" (atau kerajaan tradisional) Melayu lebih merupakan "*realm*" (dunia atau "alam") Melayu – meminjam istilah Matheson (1975). Antara yang satu dan yang lain terdapat ikatan yang longgar dan bahkan bisa

sekali tarik-manarik interpretasi sejarah antara yang satu dengan yang lain: Jambi atau Palembang sebagai pusat Melayu Kuno menyiratkan perdebatan lama. Orang tinggal pilih yang mana? Semuanya juga sudah tersedia studi-studi klasik mengenai Melayu Jambi dan Sriwijaya (lihat catatan no. 4 di atas).

bersaing satu sama lain. Kerajaan Sriwijaya, misalnya, meskipun sering disebut kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya (abad ke-7-8M), kekuasaan kerajaan itu tidak pernah mencapai status sebuah imperium kekaisaran (seperti Cina atau mungkin Mojopahit) sebagaimana didefinisikan oleh Kulke (1986) dan Wolters (1981), Munoz (2009: 162).

Ciri kedua ialah dari segi setting waktu atau periodisasinya, sejarah "Melayu Kuno" Sumatera berlangsung antara abad ke-7 s.d. abad ke-14. Periode ini oleh sejumlah pakar purbakala sering juga disebut "Periode Klasik", seperti yang dikemukakan oleh J. Miksic (1980) dan Munoz (2009: 152).⁷ Sejarawan M.D. Mansoer dkk (1970:40) dalam hubungannya dengan sejarah Minangkabau lama menyebut periode klasik ini dengan "Periode Minangkabau Timur" yang berlangsung antara abad ke-7-14, atau sebelum Raja Aditawarman memindahkan pusat kerajaan dari Dharmasraya ke Pagaruyung. Periode sejarahnya adalah ketika nenek moyang *wangsa* Melayu sudah memasuki "masa sejarah" (atau setelah mengenal tulisan – bahasa Melayu Kuno). Dalam rentang waktu selama lebih kurang delapan abad itu, terdapat sejumlah kerajaan yang timbul tenggelam atau bergeser dari waktu ke waktu dari satu tempat ke tempat lain seperti yang tampak dalam tabel 1 (terlampir).

Erat kaitannya dengan ciri kedua di atas, ciri ketiga ialah dari segi letaknya, bahwa sejarah "Melayu Kuno" Sumatera umumnya tersebar di daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir ke pantai timur. Pusat gravitasi sejarahnya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Adakalanya berada di kawasan hulu, di pertemuan dua sungai atau di muranya dekat pantai (lihat peta).

Ciri keempat ialah bahwa terbatasnya sumber-sumber lokal, terutama berupa naskah tulisan. Meskipun nenek moyang orang Melau Kuno sudah mengenal bahasa Melayu Kuno dengan varian lokal masing-masing, informasi kesejarahan dari bahasa mereka amat terbatas. Umumnya berasal dari sumber-sumber asing (Barat, Cina, India, Arab dan Jawa Kuno atau Sanskerta), baik berupa inskripsi atau prasasti, maupun berupa catatan tertulis dari naskah kuno berupa kronik kerajaan Cina dan Jawa (seperti *Pararaton* karya Mpu Tantular dari abad ke-13). Interpretasi sejarah berdasarkan bukti-bukti arkeologis, linguistik, topografis atau "bentang alam dan tradisi, bagaimana pun, mengandung resiko terhadap munculnya bermacam-macam versi penafsiran. Misalnya saja, tafsir linguistik mengenai kata Melayu itu sendiri saling kontradiktif. Menurut De Casparis (1985: 247) kata "melayu" berasal dari bahasa Tamil (India), yang berarti "bukit". Pendapat ini diperkuat oleh studi Sartono (1992:

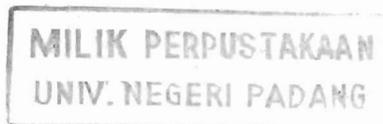
⁷ Periode klasik ini oleh R. Soekmono dan juga Miksic (1986), Se Capasrais (1985) dapat dibagi lagi ke dalam tiga bagian: (i) periode klasik "awal" (abad ke-7-9 M), (ii) "klasik tengah" (abad ke-9-13 M) dan (iii) "klasik akhir" (abad ke-14-15 M). Kita akan kembali membahas ini dalam hubungannya dengan Kerajaan Dharmasraya di belakang nanti. .

8), yang mengatakan bahwa kerajaan Koying pada abad ke-7 "terletak di suatu daerah yang banyak gunung apinya. Daerah ini mestinya terletak di sekitar atau di tengah-tengah Bukit Barisan." Namun sejarawan Jambi, Fachruddin Saudagar tetap bersikeras mengatakan bahwa pusat Melayu Kuno adalah di Jambi sekarang, meskipun kata *melayu* dalam bahasa Jambi artinya "layu" atau tiada berdaya (Saudagar 1992: 14). Tetapi di Muara Jambi ada Bukit Melayu dan Sungai Melayu. Yakin dengan banyaknya tinggalan prasasti di Muara Jambi, termasuk di dalam Kota Jambi sekarang (prasasti Solok Sipin), ia sampai pada kesimpulan bahwa "sejak tahun 644 - 1285 M Kerajaan Melayu [kuno] tetap ada di daerah Jambi (*ibid*, h. 29). Kalau begitu, mengapa arca Amoghapasa yang indah dan monumental itu dikirim oleh raja Jawa (Singosari) ke Dharmasraya dan bukan ke Kota Jambi atau Muara Jambi?

Diskusi terperinci setiap butir informasi arkeologi (prasasti) dan tafsir linguistik yang diberikan kepadanya sangat melelahkan dan adakalanya menjadi sia-sia. Sebagian mungkin hanya karena "asal jadi" atau kecerobohan,⁸ sebagian lain karena keetratasan sumber pembanding. Akibat keterbatasan sumber ini, para pakar cenderung berbeda pendapat dalam menafsirkan hampir setiap fragmen data yang ada dalam sumber. Memang masalah utama dalam studi sejarah Melayu Kuno Sumatera khususnya berkaitan erat dengan masalah letak/ kewilayahan dan urutan kronologis waktunya (Dja'far 192: 25). Yang terakhir ini juga mengundang debat berkepanjangan apakah letak Sriwijaya di Jambi atau Palembang, sebelum akhirnya dituntaskan pada tahun 1990-an oleh riset Manguin (Munoz, 2009) bahwa bukan Jambi seperti yang diklaim Moens (1924) dan pendukungnya, melainkan di Palembanglah letak ibukota Sriwijaya.

Akhirnya ciri kelima ialah bahwa dilihat dari segi agama dan/ atau kepercayaan, kerajaan-kerajaan Melayu Kuno seringkali dirujuk sebagai penganut agama Hindu-Budha. Namun menurut De Casparis (192: 7), agama Hindu sebetulnya tidak pernah berpengaruh benar di Sumatera, melainkan agama Budha-lah yang lebih dominan. Kita belum tahu bagaimana pergantian raja-raja di sana diatur di zaman kuno. Misalnya apakah terdapat hubungan yang tegas antara yang "politik" dan yang "religius" (agama) dalam sistem kekuasaan lama, atau hubungan "tuhan-raja" (*god-*

⁸ Sebagai ilustrasi misalnya tafsir kata "Pamalayu" dalam naskah Negarakrtagama (1365M), bermakna rancu: apakah maksudnya itu "serangan ke Melayu" atau "ekspedisi" atau semacam ziarah kemitraan dan seterusnya ke negeri Melayu (De Casparis, 1985) cf. Atmodjo (1992:2). Begitu pula kata "Baroussai" di Pulau Sumatera (*sumati-ra* atau *samotra*) dalam sumber Ptolemeus (Yunani Kuno) pada abad pertama Masehi maksudnya adalah sama dengan Barus di pantai barat Sumatera atau identik dengan "Batu Rusa" di Bangka atau "Tanjung Rusa" di Belitung seperti yang ditafsirkan secara agak semena-mena oleh Van der Meulen SJ (1988: 46). Lihat juga di bekalang tentang tafsir "Dara Petak" dan "Dara Jingga" dua putri Melayu Dharmasraya yang dibawa ke Jawa seakut ekspedisi "Pamalayu tahun 1275M.



953. 81

2ed

d. 1

king relationship – atau raja-ilahi) sebagaimana yang diidentifikasi oleh Van Heine Goldren tentang "negara" klasik Asia Tenggara umumnya, masih memerlukan penyelidikan kasus per kasus untuk menarik generalisasi yang memadai. Dengan kata lain, diperlukan suatu studi komparatif mengenai data hukum-hukum adat pribumi, sistem kepercayaan transendental (kosmologi) dan dunia (tentang alam; laut, hutan dsb.), penyebaran etnik, dll guna membantu memahami infrastruktur sosial-politik di Asia Tenggara (Von Geldren). Namun secara umum dapat dikatakan, bahwa Asia Tenggara (dengan kekecualian kasus Filipina yang unik) umumnya menjadi *locus* dari pengaruh Hindu dan Budha atau antara *Indinized* dan *Cinicized* untuk meminjam istilah Coedes dan Harry J. Benda (1968). Walaupun konsep magis dan kosmologi pusat yang sakral juga dikenal dalam di Asia Tenggara umumnya, pengaruh kekuasaan birokrasi sentralistik *a la* mandari Cina atau Mataram Lama dan Mojopahit di Jawa tidaklah begitu besar pengaruhnya. Makin teliti orang memperhatikan "negara" (kerajaan) tertentu di Asia Tenggara kuno, maka pada gilirannya tapak bahwa negara sama sekali tidak "diperintah", malahan tidak diatur dengansedemikian sistematis. Orang lalu terpaksa bertanya apa sebenarnya yang menyebabkan "negara" itu dapat menjaga keutuhannya sampai periode yang lama? Pertanyaan ini tersedia jawabannya dari Lorraine Gesik (1993: xix), bahwa ciri yang menonjol pada semua pemerintahan Asia Tenggara ialah keyakinan bahwa akan dukungan kesetiaan bawahan terhadap raja dan bawahannya sebagai tokoh yang paling "sakral" dalam bentuk hubungan *god-king* dan hubungan kesetiaan dalam bentuk *patron-client* antara atasan dan bawahan. Namun dalam kasus Melayu Kuno Sumatera dapat ditambahkan bahwa pertautan antara ranah kosmologi dan ideologi wangça Melayu Kuno sebagaimana yang disinggung di muka menjadi penting. Jjika ada istilah "daerah-daerah bawahan" (*dependencies*), masih berbunyi sebagai "bawahan" dan itu agak berat artinya, sebab kekuasaan konkret dari luar tidak ada di sana. Dan di Minangkabau khususnya, kata-kata dan titah raja dan sumpah-setia sudah memiliki harga kekuasaan (Drakkar, 1993) dan pada umumnya begitulah yang berlaku di alam Melayu Kuno umumnya.